



Malioboro Harus Bersih Reklame

YOGYAKARTA – Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mendesak Pemerintah Kota Yogyakarta menertibkan reklame di sepanjang Jalan Malioboro. Reklame komersial yang terpasang di jantung Kota Gudeg tersebut dinilai sudah mengaburkan aspek *heritage* Malioboro. Banyak bangunan bernuansa Indies, Chinese, Eropa, Arab dan lainnya yang tidak terlihat lagi karena tertutup reklame komersial.
KeHal7)

«Dari Hal 1

Pengageng Keraton Yogyakarta Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Hadiwinoto mengatakan, dari sisi arsitektur bangunan, banyak bangunan di Malioboro memiliki nuansa cagar budaya. "Kalau bersih dari reklame (komersial) *kan bagus, heritage-nya jadi kelihatan,*" katanya, kemarin.

Adik Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X ini menambahkan, jika masih menginginkan Yogyakarta sebagai kawasan cagar budaya, maka reklame di Malioboro harus ditata. "Reklame dalam

bentuk *light box* saat ini lebih dominan dari pada nama tokonya. Justru reklame rokok atau apalah yang ditonjolkan, bukan nama tokonya. Bangunan atau toko di sepanjang Malioboro yang *heritage* itu perlu ditonjolkan, bukan reklame-reklame yang *gede-gede sing ra genah* (besar-besar tidak jelas)," jelasnya.

Gusti Hadi mengatakan, pihak yang punya kewenangan untuk menindak tegas terkait reklame komersial adalah Pemkot Yogyakarta. Keraton Yogyakarta sebagai lembaga adat yang menjaga kultur maupun budaya Jawa hanya bisa

berharap Pemkot Yogyakarta berani bersikap tegas. "Yang berwenang, tanya ke *juragane* (wali kota)," tegasnya.

Dia juga meminta kepada Pemkot Yogyakarta juga menata pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Malioboro. Penataan PKL harus sudah baik sebelum kawasan pedestrian di bawah tanah Malioboro. "Kalau sudah ditata reklamenya, tapi PKL masih seperti itu *ya tetep elek* (jelek). Jika nanti ada pedestrian di bawah Malioboro yang ditata lokasinya, jadi atas itu bersih dari PKL," ungkapnya.

Wali Kota Yogyakarta Herry

Zudianto sepakat Malioboro bersih dari reklame besar-besar yang menutupi arsitektur India, China, dan lainnya. Untuk mengatur itu, pihaknya sudah menyiapkan peraturan wali kota (perwal). "Kita segera terbitkan reklame yang ada batasan ukuran dan besarnya. Diatur pula bagaimana arsitekturnya. Yang penting jangan menyatu, jangan menutup bangunan *heritage,*" ungkapnya.

Herry mengatakan, izin reklame hanya berlaku selama satu tahun. Jika reklame itu menyimpang dari perwal yang diterbitkan, pihaknya dengan tegas tidak akan mengeluarkan

izin perpanjangannya. "Ini sedang saya susun perwal teknisnya. Begitu sudah selesai perwal teknis, sudah tidak ada reklame yang mengganggu *heritage* Malioboro," paparnya.

Dia menegaskan siap mengusur bangunan atau toko yang tetap nekat memasang reklame yang menyimpang perwal. "Kalau tetap nekat, *ya gampang nek kon nggusur, sing angel ki narkoba. Nek reklame aku isih sanggup nggusur* (Mudah kalau mengusur, yang sulit itu narkoba. Kalau reklame saya masih sanggup mengusur)," tegasnya.

• ridwan anshori

Kepada Yth. :
 1. Walikota Yogyakarta
 2. Wakil Walikota Yogyakarta
 3. Sekretaris Daerah
 4. ...
 Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
3. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			
4. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 19 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005